

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, masyarakat semakin *concern* terhadap hak dan kewajiban pengelolaan pada keuangan daerah yang berlaku pada instansi pemerintah dengan memberikan beberapa aspirasi yang membangun. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi-informasi yang relevan dengan transaksi pada posisi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait selama satu periode pelaporan. Pada dasarnya laporan keuangan berguna untuk membuat keputusan dengan menilai akuntabilitas pemerintahan, membandingkan realisasi pada pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, juga berguna untuk melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi pada entitas pelaporan.

Pemerintah daerah harus memperhatikan nilai informasi yang diberikan dalam laporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, karena semua informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah harus memiliki karakteristik yang memadai. Pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki tata kelola keuangan menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berguna sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003, maka pemerintah membuat peraturan untuk mengatur dan mengelola laporan keuangan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. SAP pertama kali diterapkan pada Tahun 2015 yang berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Menurut BPK Harry Azhar Aziz pada saat LHP LKPP Tahun 2015 dengan adanya SAP berbasis akrual ini diharapkan laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel dan transparan dalam menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara guna mendukung segala bentuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah berbasis akrual diharapkan bisa digunakan untuk membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah. Karena untuk memperbaiki kualitas dan kinerja dalam mengelola keuangan pemerintah, dibutuhkan suatu standar dalam laporan keuangan agar lebih terstruktur sehingga bisa menjadi suatu perbandingan, sesuai dengan spesifikasi yang digunakan dalam good governance. Dengan adanya informasi berbasis akrual maka pemerintah bisa menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Karena dengan menggunakan basis akrual maka akan terlihat secara jelas akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya dan juga memberikan sarana bagi pengguna laporan untuk melakukan evaluasi terhadap laporan posisi keuangan daerah. Menurut Sunardi (2016) penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik), yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak hanya sekedar basis kas. Menerapkan

basis akrual sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten dalam pengelolaan keuangan karena, terkadang terdapat masalah dalam penilaian, pengakuan, pelaporan asset, kewajiban dan ekuitas, dibutuhkan SDM yang menguasai akuntansi pemerintah. Dengan dibentuknya SAP diharapkan seluruh laporan akuntansi bisa diproses oleh bagian pemerintahan dan entitas-entitasnya sesuai dengan pedoman pada standar akuntansi yang ada sehingga laporan keuangan yang ada bisa dihasilkan dengan baik karena pada akhirnya nanti laporan keuangan Pemerintah Daerah ini akan menjadi salah satu faktor penentu dana pengambilan keputusan dan penentu kebijakan keuangan oleh pihak terkait. Menurut Nordiawan dkk, (2007: 34) “Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia diperlukan adanya sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh suatu komite SAP.”

Dalam laporan keuangan daerah akuntabilitas oleh pemerintahan daerah menjadi sangat penting yaitu sebagai bentuk tanggung jawab dari kinerja pemerintah daerah selama ini secara periodik. Sedangkan, transparansi pada laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi karena masyarakat yang telah mempercayakan kuasanya kepada pemerintah maka mereka berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas kinerja tersebut. Sehingga bisa membantu melakukan pengawasan agar jalannya pemerintahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan menggunakan basis akrual maka *user* bisa menggunakannya untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Sebelumnya pemerintah telah menggunakan sistem akuntansi berbasis kas kemudian diubah menjadi basis akrual. Pada tahun 2015 pertama kali digunakan oleh Pemerintah Pusat kemudian karena dianggap menguntungkan maka

Kementrian Keuangan mengembangkannya menjadi sistem akuntansi berbasis akrual agar bisa digunakan oleh setiap sistem pemerintahan yang ada. Sistem akuntansi ini digunakan secara paralel dengan harapan sistem aplikasi keuangan telah terintegrasi sesuai dengan tahapan yang ada.

Pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam pertanggung jawabannya masih seringnya ditemukan kesalahan, ketidakbenaran, dan ketidak teraturan pada laporan keuangan. Seperti tidak bisanya mengelola aset negara dengan baik dan dilaporkan tidak wajar sehingga menimbulkan temuan pada opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKP dan LKPP. Dan hal ini bisa terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan oleh lembaga-lembaga publik.

Karena sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih menerapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas dan masih kurang memadai dalam menyusun laporan keuangan sehingga digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan diharapkan bisa untuk menyajikan laporan keuangan yang kredibel.

Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.”**

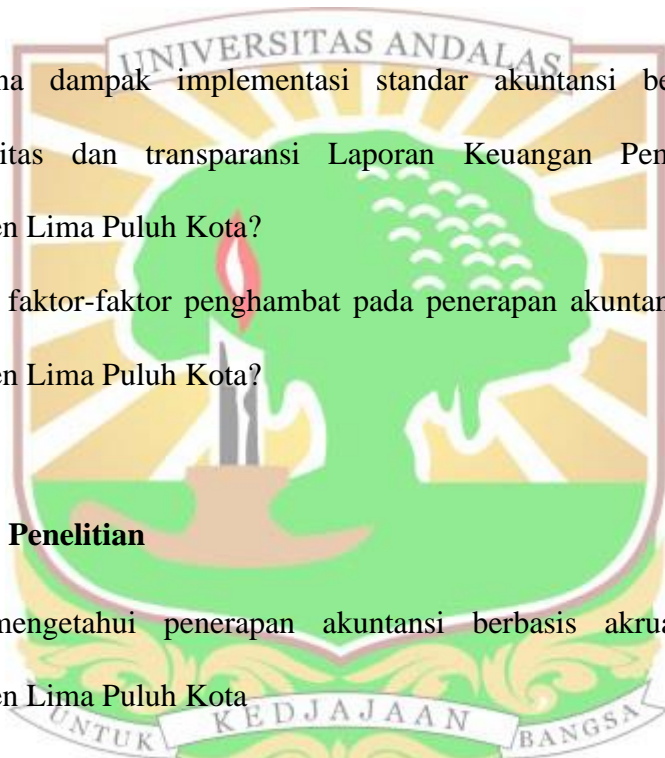
12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual?
3. Bagaimana dampak implementasi standar akuntansi berbasis akrual pada akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota?
4. Apa saja faktor-faktor penghambat pada penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Lima Puluh Kota?

13 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual
3. Untuk mengetahui dampak implementasi standar akuntansi berbasis akrual pada akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat saat penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Lima Puluh Kota



14 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi;

1. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, menambah pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, terhadap akuntabilitas dan transparansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dalam instansi pemerintahan.

2. Manfaat Bagi Instansi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi serta pemikiran bagi untuk instansi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar memahami pentingnya dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang berimplikasi terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi tentang konsep penerapan sistem akuntansi berbasis akrual keuangan daerah bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

15 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian, kerangka penelitian, review penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan mengungkapkan mengenai desain penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, metode analisis data, dan alat-alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

